



Economy Blue Sebagai Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bulukumba

Andira Nurqalbi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: andiranurqalbi20@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
<p>Genesis Artikel: Diterima, 08 Desember 2024 Direvisi, 15 Desember 2024 Disetujui, 31 Desember 2024</p>	<p>Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru melalui sektor perikanan, pariwisata bahari, pengolahan hasil laut, dan pelestarian budaya maritim seperti pembuatan perahu Pinisi. Strategi ekonomi biru di daerah ini mencakup perikanan berkelanjutan, diversifikasi pendapatan melalui produk bernilai tambah, konservasi ekosistem laut, dan pengembangan pariwisata berbasis edukasi. Kendati demikian, penerapan ekonomi biru menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, modal, serta pengetahuan masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, ekonomi biru diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan ekosistem laut, dan menciptakan kesejahteraan bagi generasi mendatang.</p>
<p>Kata Kunci: Ekonomi Biru Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Laut</p>	
<p>Keywords: Blue Economy Sustainable Development Marine Resource Management</p>	
	<p>ABSTRACT</p> <p><i>The blue economy is a sustainable development approach utilizing marine resources for economic growth, ecosystem preservation, and community well-being. Bulukumba Regency in South Sulawesi possesses significant potential to develop a blue economy through sustainable fisheries, marine tourism, seafood processing, and the preservation of maritime traditions such as Pinisi boat crafting. Strategies in this region include sustainable fishing, income diversification via value-added products, marine ecosystem conservation, and education-based tourism development. However, challenges such as limited infrastructure, capital access, and community knowledge hinder its implementation. Through government and community collaboration, the blue economy aims to foster inclusive, environmentally friendly development, supporting marine ecosystem sustainability and ensuring prosperity for future generations.</i></p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> 
<p>Penulis Korespondensi: Andira Nurqalbi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Email: andiranurqalbi20@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN (10 PT)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tahun 2024 berada di kuartal I mencapai 5,11% ini tentunya menjadi pencapaian yang baik karena 20 tahun kebelakang Indonesia bisa menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Namun kenyataannya apakah 5% ini cukup untuk Indonesia kedepan, tentunya tidak cukup mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini tercatat 282,48 juta jiwa (Ditjen Dukcapil, 2024) dan jumlah pengangguran mencapai 7,47 juta orang, Oleh sebab itu perlu adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk 20 tahun kedepan dengan target 6 -7% . Salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah adalah mendorong industrialisasi, jasa yang bernilai tinggi, dan yang paling potensial untuk ekonomi Indonesia ke depan adalah ekonomi biru.

Sumber daya laut Indonesia sangat kaya dan luar biasa sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan yang 65% areanya terdiri dari laut, tetapi potensi laut ini belum bisa dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat karena beberapa kendala (Kemenhub RI, 2023). Padahal jika dimanfaatkan secara ekonomi bisa menjadi sektor pertumbuhan baru dan berkelanjutan yang dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk Indonesia agar bisa lebih maju dan bersaing dengan negara lain.

Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang laut, yaitu: Ekonomi biru adalah pendekatan yang berfokus pada pengelolaan laut secara berkelanjutan dengan melestarikan sumber daya laut, pesisir, dan ekosistemnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, pemanfaatan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, dan peningkatan pendapatan. Di Indonesia, ekonomi biru meliputi berbagai sektor seperti perikanan tangkap dan budidaya, industri manufaktur kelautan, pembuatan kapal, pariwisata pesisir, layanan maritim, bioteknologi dan bioekonomi, serta kegiatan penelitian, pengembangan dan pendidikan (Kementerian Perikanan & Kelautan, 2014).

Selain itu, Ekonomi biru ini hadir sebagai strategi yang menentukan kepentingan negara, kemakmuran, serta keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program global oleh PBB yaitu SDGS (Sustainable Development Goals) dengan tujuan antara lain:

- a) SDG 1 (Tanpa kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi): mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor kelautan seperti pariwisata, perikanan, dan energi laut
- b) SDG 7 (Energi bersih dan terjangkau): mengembangkan energi terbarukan berbasis laut
- c) SDG 13 (Aksi iklim): mengurangi dampak perubahan iklim melalui pengelolaan blue carbon
- d) SDG 14 (Kehidupan bawah laut): Melindungi ekosistem laut dan pesisir dari degradasi akibat penangkapan ikan yang berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim.

Jika Indonesia berhasil menerapkan konsep Ekonomi Biru, pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) dapat dipercepat secara signifikan. Berdasarkan estimasi Bank Dunia, sektor ekonomi kelautan Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan lebih dari USD 280 miliar setiap tahunnya, terutama dari sektor konstruksi maritim dan manufaktur. Selain itu, sektor pariwisata berbasis terumbu karang dapat menyumbang sekitar USD 3 miliar per tahun, mengingat Indonesia memiliki kekayaan terumbu karang yang sangat indah dan beragam. Di sektor perikanan tangkap, pada tahun 2018 saja, Indonesia mencatat permintaan pasar internasional yang signifikan dengan nilai ekspor mencapai USD 4,12 miliar. Pertumbuhan ekonomi biru dalam periode 2012–2020 tercatat meningkat rata-rata 10,5% per tahun, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 5% per tahun.

Berbeda dengan negara-negara ASEAN dan Asia pasifik lainnya, ekonomi laut Indonesia didominasi oleh sektor perikanan tangkap laut, akuakultur, dan pengolahan ikan. Namun, pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan pada ekonomi laut Indonesia. Selain mengalami penurunan ekonomi yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, pandemi juga mengungkap berbagai masalah struktural, seperti aktivitas ekonomi di banyak

sektor pariwisata. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya bangkit dan memulihkan sektor ekonomi kelautannya pasca pandemi (Alifa N.N, & Zahidi M.S, 2024). Penerapan ekonomi biru membawa manfaat bagi wilayah dengan potensi besar di sektor maritim. Konsep ini dapat menjadi Solusi bagi keterbatasan wilayah daratan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pesisir. Penerapan ekonomi biru membawa manfaat bagi wilayah dengan potensi besar di sektor maritim. Konsep ini dapat menjadi solusi pelengkap bagi keterbatasan wilayah daratan (ekonomi hijau) sebagai pendekatan komplementer yang membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di sektor kelautan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pesisir (Lutvia Resta Setyawati, et al, 2021) salah satunya di kabupaten Bulukumba.

Kabupaten bulukumba merupakan bagian daerah pesisir yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terdiri dari 24 kabupaten dan 307 kecamatan yang terkenal dengan sektor maritim mulai dari perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Bulukumba, yang memiliki garis pantai sepanjang ± 128 km (Peta Bulukumba), ekonomi biru menawarkan potensi besar untuk menciptakan peluang kerja bagi komunitas pesisir. Konsep ekonomi biru menjadi relevan untuk mendukung pembangunan di wilayah ini, terutama karena dapat memberikan peluang kerja yang luas sekaligus melestarikan ekosistem laut. Namun, pengembangan ekonomi biru di Bulukumba masih belum dioptimalkan dengan baik karena beberapa hambatan salah satunya keterbatasan keterampilan dan akses sumber daya di kalangan masyarakat pesisir. Ekonomi biru juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek pembangunan, yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berfokus pada kelestarian ekosistem laut.

Untuk mendalami teori kesadaran dalam konteks ekonomi biru, kita dapat mengacu pada pemikiran paulo freire yang menggolongkan empat tingkatan kesadaran manusia: kesadaran intransitif, dimana seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas; kesadaran magis, di mana masyarakat hanya menerima kondisi tanpa mempertanyakannya; kesadaran naif, di mana masyarakat mulai menyadari masalah tetapi cenderung menyalahkan pihak luar; dan kesadaran kritis, di mana masyarakat mampu menganalisis kondisi sosial-ekonomi secara mendalam dan berpartisipasi aktif dalam merumuskan solusi (Paulo Freire; 1970).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran ekonomi biru sebagai pilar utama dalam membangun inklusivitas yang dapat membuka peluang kerja berkelanjutan bagi komunitas pesisir di Kabupaten Bulukumba. Pendekatan berbasis kesadaran kritis ala Freire menekankan bahwa masyarakat pesisir perlu diberdayakan untuk menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. Penelitian ini juga berfokus pada penggalian potensi lokal, tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara efektif dan berwawasan lingkungan, serta merumuskan strategi pemberdayaan dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan pendekatan ini, masyarakat pesisir diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistik.

2. METODE PENELITIAN

Menjelaskan Ekonomi biru adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli dalam bukunya "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs"

(Gunter Pauli; 2010). Pauli mengemukakan bahwa ekonomi biru merupakan model pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan melestarikan lingkungan. Konsep ini berbeda dengan ekonomi hijau, karena selain berfokus pada pengurangan emisi dan polusi, ekonomi biru juga mempromosikan penggunaan limbah atau hasil sampingan dari suatu aktivitas sebagai sumber daya yang dapat dipakai kembali, menciptakan proses yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu sektor utama dalam ekonomi biru adalah sektor kelautan, yang mencakup perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan yang bersumber dari laut, serta industri maritim lainnya. Berdasarkan laporan dari sektor kelautan memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja, terutama di negara-negara yang terletak di kawasan kepulauan dan pesisir.

Menurut Setyawati (Setyawati et al.; 2021) dalam "Implementasi Konsep Ekonomi Biru Dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir Di Kota Sabang" mengenai implementasi konsep ekonomi biru di Kota Sabang dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Bulukumba untuk mengembangkan pendekatan yang serupa. Hal ini melibatkan perencanaan yang berbasis data, penguatan koordinasi antar-stakeholder, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Dalam konteks Kabupaten Bulukumba, upaya ini dapat diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti pengembangan ekowisata berbasis budaya maritim, budidaya perikanan ramah lingkungan, serta pengelolaan pesisir yang partisipatif.

Kemudian diteruskan dengan Studi Latupapua (Latupapua et al.; 2022) dalam tulisannya berjudul "Edukasi Masyarakat Negeri Sawai; Optimalisasi Potensi Usaha di Desa Wisata Berbasis Ekonomi Biru" mengungkapkan bahwa edukasi masyarakat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi usaha berbasis ekonomi biru. Dalam konteks pengembangan ekonomi di daerah pesisir, edukasi dan pelatihan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini termasuk pengelolaan wisata berbasis ekosistem laut, budidaya perikanan yang ramah lingkungan, serta pengurangan dampak pencemaran laut. Konsep ini relevan untuk diterapkan di Kabupaten Bulukumba yang memiliki potensi besar di sektor kelautan, khususnya dalam perikanan dan pariwisata.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menegaskan bahwa ekonomi biru tidak hanya relevan sebagai pilar pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Bulukumba, tetapi juga sebagai solusi untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan global dan ketimpangan ekonomi lokal. Melalui implementasi yang strategis dan inklusif, konsep ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature research untuk menganalisis peran ekonomi biru dalam pembangunan inklusif, khususnya peluang kerja bagi komunitas pesisir di Kabupaten Bulukumba (Zaenal Arifin; 2020). Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan daerah, serta laporan organisasi internasional (misalnya UNDP dan FAO). Literatur ini diidentifikasi melalui kata kunci seperti ekonomi biru, pembangunan inklusif, komunitas pesisir, dan Kabupaten Bulukumba. Seleksi data didasarkan pada relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterkaitan konteks lokal (Nurul Hayati; 2016).

Teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, analisis tematik, dan interpretasi data. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari berbagai sumber untuk

mengidentifikasi tema utama, seperti potensi ekonomi biru, peluang kerja di sektor kelautan, dan keterkaitan ekonomi biru dengan pembangunan inklusif. Analisis tematik mengungkap pola atau hubungan antara ekonomi biru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan penekanan pada relevansi dengan situasi di Kabupaten Bulukumba (Asep Deni, et al; 2024).

Untuk memastikan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur. Evaluasi kritis juga dilakukan untuk menilai keandalan dan kredibilitas setiap sumber. Penelitian dilaksanakan dalam empat tahapan: persiapan (identifikasi literatur), pengumpulan data (penggalan sumber relevan), analisis data (reduksi dan tematisasi), serta pelaporan (penyusunan narasi sistematis). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mendukung penerapan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan inklusif di Kabupaten Bulukumba (Asep Mulyana, et al: 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penerapan Economy Blue di Bulukumba

Ekonomi biru merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian ekosistem laut. Konsep ini berupaya menggabungkan prinsip keberlanjutan, inovasi, dan inklusivitas dalam menciptakan solusi ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan kelestarian lingkungan (Faisyal Rani & Wulandari Cahyasari; 2015). Ekonomi biru berfokus pada sektor-sektor utama seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis kelautan, energi terbarukan dari laut, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Semua sektor ini memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sesuai dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS), seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan pekerjaan yang layak, dan menjaga kehidupan bawah laut (Eny Latifah & Rudi Abdullah; 2024). Kabupaten Bulukumba, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi biru berkat kekayaan sumber daya kelautannya.

Beberapa contoh penerapan ekonomi biru yang dapat ditemukan di daerah ini adalah Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru melalui pemanfaatan sumber daya kelautannya. Perikanan tangkap, misalnya, menjadi salah satu aktivitas ekonomi utama, di mana nelayan setempat kini mulai mengadopsi alat tangkap ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan habitat laut. Pendekatan ini tidak hanya memastikan stok ikan tetap tersedia di masa depan, tetapi juga menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka. Selain itu, pengembangan budidaya perikanan, seperti rumput laut, ikan bandeng, dan ikan kerapu, membantu mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan liar, memberikan peluang ekonomi baru, serta memperluas sumber pendapatan masyarakat (Tri Djoko Leksono, et al; 2022).

Pada sektor pengolahan hasil laut, masyarakat di Kabupaten Bulukumba tidak hanya mengandalkan penjualan hasil tangkapan ikan secara langsung, tetapi juga mengolahnya menjadi berbagai produk bernilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Produk-produk yang dihasilkan meliputi ikan asin, kerupuk ikan, dan abon ikan, yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Selain itu, mereka juga mengembangkan produk

non-pangan berbahan dasar rumput laut, seperti pupuk organik cair dan kosmetik, yang semakin populer di kalangan konsumen. Aktivitas pengolahan hasil laut ini tidak hanya membantu dalam mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mengurangi limbah laut dengan memanfaatkan potensi hasil laut secara maksimal, sehingga mendukung prinsip ekonomi biru yang berkelanjutan (Nurilmi, N; 2022).

Budaya lokal di Kabupaten Bulukumba memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi biru, khususnya melalui tradisi pembuatan perahu Pinisi yang telah mendapat pengakuan internasional sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Proses pembuatan perahu Pinisi ini bukan hanya sekadar kegiatan kerajinan tangan, melainkan juga merupakan simbol kuat dari budaya maritim yang telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Bulukumba. Aktivitas ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan laut dan menguatkan identitas lokal mereka. Selain sebagai warisan budaya, pembuatan perahu Pinisi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, karena kegiatan ini terintegrasi dengan sektor pariwisata bahari. Salah satunya melalui wisata edukasi pembuatan Pinisi, yang memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk belajar langsung mengenai teknik pembuatan perahu tradisional ini, sambil menikmati keindahan alam sekitar. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata dan industri kreatif berbasis budaya (Muhammad Yamin Sani & Muhadjir Suni; 2019).

Selain itu, potensi besar pariwisata bahari yang dimiliki Kabupaten Bulukumba, terutama yang terdapat di destinasi terkenal seperti Pantai Tanjung Bira dan Pulau Liukang Loe, memainkan peran yang sangat penting sebagai motor penggerak utama ekonomi di wilayah pesisir. Kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam laut yang mempesona, tetapi juga menjadi tempat yang populer bagi kegiatan wisata alam seperti snorkeling, diving, dan berbagai bentuk ekowisata berbasis mangrove. Aktivitas-aktivitas ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan, sekaligus mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan pariwisata bahari ini melibatkan secara langsung masyarakat lokal, yang tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor wisata, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan ekosistem laut dan mangrove. Pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di samping itu, kegiatan wisata yang berbasis pada pelestarian alam juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi pengunjung untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi alam, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan, sehingga mereka lebih memahami peran vital ekosistem laut dan mangrove dalam menjaga keseimbangan lingkungan (Juhannis; 2015).

Terakhir, kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari abrasi serta menjaga habitat laut. Masyarakat lokal yang terlibat dalam program ini mendapatkan manfaat langsung berupa lapangan kerja, sekaligus kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Dengan integrasi dari berbagai sektor ini, ekonomi biru di Bulukumba menjadi landasan penting untuk pembangunan inklusif yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tetapi juga melindungi sumber daya laut bagi generasi mendatang. Implementasi yang tepat dan dukungan kebijakan pemerintah diperlukan untuk memaksimalkan potensi ini secara berkelanjutan (Eka Aprilya Handayani & Asti Sugiarti; 2021).

Penerapan prinsip ekonomi biru di Kabupaten Bulukumba ini menunjukkan bagaimana potensi kelautan daerah ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat setempat. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat dari penerapan ekonomi biru, perlu adanya investasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan infrastruktur pendukung, dan pengembangan kebijakan yang mendukung prinsip keberlanjutan dalam setiap sektor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut.

Ekonomi biru juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat pesisir dalam berbagai aspek pembangunan, yang tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut. Dalam penerapan ekonomi biru, pertumbuhan tidak hanya diukur dari besaran angka ekonomi yang tercipta, melainkan dari bagaimana setiap proses pembangunan berupaya menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Konsep ini mengusung prinsip bahwa pertumbuhan yang ramah lingkungan harus mengurangi dampak negatif terhadap alam, terutama dalam hal degradasi ekosistem laut yang sering terjadi akibat aktivitas manusia (Karin Amari Upa & Mashita Dewi Tidore; 2024).

Lebih lanjutnya, strategi ekonomi biru mendorong pengembangan sektor-sektor yang ramah lingkungan seperti energi terbarukan, yang tidak hanya mendukung ketahanan energi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, ekonomi biru juga menekankan pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, termasuk pengelolaan pesisir dan perikanan yang berkelanjutan, guna memastikan bahwa sumber daya tersebut tidak habis dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan mengoptimalkan sektor-sektor ini, ekonomi biru berpotensi menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata, sembari meminimalkan dampak sosial negatif, dan mengarah pada terciptanya pembangunan yang lebih adil serta berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Menurut (Siwage Dharma Negara; 2013) Pertumbuhan inklusif dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memastikan adanya akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Model pertumbuhan ini memungkinkan setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, untuk ikut serta dan memperoleh manfaat dari proses pembangunan ekonomi secara adil dan merata.

Aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Bulukumba yang berkaitan dengan ekonomi biru mencakup beragam sektor dan praktik yang mendukung keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah ini memiliki potensi besar dari segi perikanan, pariwisata, budaya, dan pengolahan hasil laut. Dengan pendekatan ekonomi biru, masyarakat pesisir diarahkan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, tanpa merusak keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang utama kehidupan mereka.

Analisis Penerapan Economy Blue di Bulukumba dengan Teori Kesadaran

Paulo freire dalam teorinya yaitu teori kesadaran merupakan kunci yang harus dimiliki oleh masyarakat agar perubahan dapat tercapai. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat, maka akan sangat mudah untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang ada di masyarakat. Paulo freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi menjadi 4 golongan, yakni kesadaran intransitif, kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis (Muh. Dani Butar; 2008).

Penerapan konsep ekonomi biru di Kabupaten Bulukumba, jika dilihat dari perspektif teori kesadaran paulo freire, mencerminkan tingkatan kesadaran kritis, di mana masyarakat pesisir tidak hanya memahami kondisi mereka, tetapi juga berperan aktif dalam menemukan solusi berkelanjutan. Dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, misalnya, para nelayan dilibatkan dalam pelatihan dan dialog untuk menyadari dampak negatif alat tangkap tertentu terhadap ekosistem laut. Kesadaran ini mendorong mereka menggunakan alat tangkap yang lebih ramah

lingkungan guna melestarikan ekosistem laut sekaligus mempertahankan mata pencaharian mereka (Paulo Freire; 1970).

Selain itu, tradisi pembuatan perahu Pinisi menunjukkan bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan warisan budaya untuk mendukung sektor pariwisata edukasi yang memberikan dampak ekonomi sekaligus melestarikan identitas lokal. Kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang juga dijalankan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, sehingga mereka memahami pentingnya ekosistem ini dalam melindungi wilayah pesisir dan mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Dengan cara ini, masyarakat Bulukumba menjadi aktor utama dalam pembangunan ekonomi biru yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana untuk kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Dampak Economy Blue

Dampak penerapan ekonomi biru di Kabupaten Bulukumba sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama, dari segi ekonomi, penerapan ekonomi biru telah memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pengembangan sektor seperti industri pembuatan kapal tradisional Pinisi, pariwisata bahari, serta pengolahan hasil laut, telah tercipta berbagai lapangan pekerjaan baru (Rijal; 2023). Sebagai contoh, produk olahan hasil laut seperti ikan asin, kerupuk ikan, dan rumput laut yang dihasilkan oleh masyarakat setempat memberikan nilai tambah pada hasil tangkapan laut, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka, terutama di wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi biru mendorong pengembangan sektor-sektor baru yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ekonomi biru juga berperan penting dalam diversifikasi sumber pendapatan masyarakat, yang sebelumnya sangat bergantung pada perikanan tangkap. Dengan adanya pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata berbasis mangrove, masyarakat tidak hanya mengandalkan perikanan, tetapi juga dapat memanfaatkan potensi alam lainnya, seperti wisata pantai dan ekosistem mangrove, yang semakin memperkuat ekonomi lokal dan memberikan ketahanan ekonomi yang lebih baik (Naibaho et. al; 2023). Diversifikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam, mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi, dan memberikan peluang untuk tumbuh di berbagai bidang yang saling mendukung (Soesanto et. al; 2024).

Di sisi lain, dampak ekonomi biru yang tak kalah penting adalah kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan. Dengan adanya pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata, seperti pelestarian terumbu karang dan pengurangan sampah plastik, serta pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik, ekonomi biru turut menjaga keberlanjutan lingkungan. Ekowisata berbasis mangrove, misalnya, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga melindungi pantai dari abrasi, meningkatkan kualitas habitat bagi berbagai spesies laut, dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir secara keseluruhan (Rahmawati; 2024).

Selain itu, penerapan ekonomi biru juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam banyak sektor, seperti pengelolaan pariwisata dan hutan mangrove, masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Lestariningsih; 2021). Partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan

kerja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Salah satu contoh yang menarik adalah bagaimana perempuan turut berperan dalam pengembangan produk olahan hasil laut, yang membuka peluang usaha baru dan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka, terutama dalam industri rumah tangga.

Terakhir, dampak yang sangat signifikan dari ekonomi biru adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya konservasi alam. Program wisata edukasi yang mengajarkan tentang pembuatan kapal Phinisi dan ekowisata mangrove, memberikan peluang bagi masyarakat dan wisatawan untuk lebih memahami pentingnya pelestarian alam, serta cara-cara untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir (Kusnawati et. al; 2023). Melalui pengalaman langsung ini, baik masyarakat lokal maupun pengunjung menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar mereka.

Secara keseluruhan, penerapan ekonomi biru di Kabupaten Bulukumba membawa dampak yang sangat positif, tidak hanya pada aspek perekonomian tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan sosial. Dengan memanfaatkan potensi kelautan secara bijaksana dan berkelanjutan, ekonomi biru mampu menciptakan sinergi antara kesejahteraan ekonomi dan kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik.

Hambatan Masyarakat Pesisir Dalam Memanfaatkan Peluang Kerja Berbasis Economy Blue

Masyarakat pesisir di Kabupaten Bulukumba menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam memanfaatkan potensi ekonomi biru yang tersedia di wilayah mereka. Meskipun daerah ini memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, keberhasilan untuk mengubah potensi ini menjadi peluang kerja yang berkelanjutan masih terkendala oleh sejumlah masalah struktural dan praktis (Rendi Prayuda & Dian Venita Sary; 2019). Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi oleh komunitas pesisir di Bulukumba dalam memanfaatkan ekonomi biru secara optimal:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Akses Modal

Sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Bulukumba mengandalkan cara-cara tradisional dalam melakukan kegiatan ekonomi berbasis laut, seperti perikanan dan budidaya ikan. Namun, banyak dari mereka yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap modal yang dibutuhkan untuk mengupgrade alat tangkap atau fasilitas pengolahan hasil laut yang lebih modern dan efisien. Sebagai contoh, peralatan yang digunakan seringkali sudah usang dan tidak ramah lingkungan, seperti jaring tangkap dengan ukuran yang terlalu kecil atau alat yang merusak terumbu karang. Tanpa adanya akses ke pinjaman atau dukungan modal dari pemerintah atau sektor swasta, nelayan dan pengusaha kecil kesulitan untuk berinvestasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil laut yang diperoleh.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan yang Memadai

Meskipun komunitas pesisir memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam bidang perikanan dan pengolahan hasil laut, mereka seringkali terbatas pada pengetahuan tradisional yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Banyak masyarakat pesisir belum familiar dengan praktik perikanan berkelanjutan, teknik budidaya yang ramah lingkungan, serta cara-cara pengolahan hasil laut yang dapat meningkatkan nilai tambah produk. Keterbatasan pengetahuan ini tidak hanya menghambat penerapan teknik-teknik baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan

untuk mengakses pasar yang lebih luas yang membutuhkan produk yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

3. Ketergantungan pada Praktik yang Tidak Berkelanjutan

Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan masyarakat pesisir pada praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Beberapa nelayan masih menggunakan metode tangkap yang merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bahan peledak atau jaring yang dapat merusak terumbu karang. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada keberlanjutan stok ikan, tetapi juga merusak habitat laut yang penting, seperti terumbu karang dan hutan mangrove, yang berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik yang merusak lingkungan ini dapat mengurangi kemampuan laut untuk memberikan hasil yang maksimal di masa depan, sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi biru, namun di Kabupaten Bulukumba, banyak daerah pesisir yang masih kekurangan fasilitas yang diperlukan. Pelabuhan atau tempat pendaratan ikan yang layak, fasilitas pengolahan hasil laut, dan sarana distribusi yang efisien masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan laut sulit untuk diproses dengan baik dan didistribusikan ke pasar, yang akhirnya berdampak pada daya saing produk perikanan Bulukumba. Kurangnya infrastruktur juga membatasi akses wisatawan ke potensi pariwisata bahari di daerah ini, yang sebenarnya bisa memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi masyarakat pesisir jika didukung dengan fasilitas yang baik.

5. Kebijakan yang Kurang Mendukung dan Tidak Tepat Sasaran

Di tingkat kebijakan, meskipun sudah ada beberapa inisiatif untuk mendukung sektor perikanan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, kebijakan yang ada sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kebijakan yang diterapkan tidak selalu memperhatikan aspek keberlanjutan, dan dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menyebabkan kurangnya implementasi yang efektif di tingkat lokal. Misalnya, meskipun ada regulasi terkait perlindungan terumbu karang dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengawasan yang lemah dan ketidakpastian hukum sering kali mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

6. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

Dampak perubahan iklim dan kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia menambah tantangan bagi masyarakat pesisir. Perubahan suhu air laut, peningkatan tingkat keasaman air, serta kenaikan permukaan laut mengancam kelangsungan hidup terumbu karang, hutan mangrove, dan biota laut lainnya yang merupakan sumber daya penting bagi ekonomi biru. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya mengurangi produktivitas perikanan, tetapi juga memperburuk kondisi ekosistem yang menjadi dasar kehidupan masyarakat pesisir.

REFERENSI

Alifa, N. N., Zahidi, M. S., & IP, S. (2024). Pengembangan ekonomi biru sebagai strategi Indonesia menuju ekonomi maju. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 38(1), 48-65.

- Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1).
- Badan Statistik. Ekonomi Indonesia Triwulan III 2024 tumbuh 1,50 persen (q-to-q).
- Deni, H. A., Mm, C. Q. M., Fatkhur Rohman Albanjari, M. E., Nurofik, A., Anwar, H. M., Bakri, A. A., ... & Anshori, M. I. (2024). Metodologi penelitian bisnis. Cendikia Mulia Mandiri.
- Hayati, N. (2016). Analisis sitiran sebagai alat evaluasi koleksi perpustakaan.
- Handayani, E. A., & Sugiarti, A. (2021, December). Partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove di kawasan ekowisata Luppung Kabupaten Bulukumba. In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan* (Vol. 2, pp. 1-9).
- Juhannis, J. (2015). Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pulau Liukang Loe Kabupaten Bulukumba. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(1), 12-21.
- Jumlah terbaru penduduk RI: total 282,477,584 jiwa, terbanyak laki-laki. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/07/15182681/jumlah-terbaru-penduduk-ri-total-282477584-jiwa-terbanyak-laki-laki>
- Kemenhub<https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Bkemenhub-jadi-ketua-pelaksana-peringatan-hari-nusantara,-siap-perkuat-kembali-indonesia-sebagai-negara-kepulauan#:~:text=Peringatan%20Hari%20Nusantara%202023%2C%20telah,Pelaksana%20Penyelenggaraan%20Hari%20Nusantara%202023.>
- Kusmawati, K., Latif, A., & Anjarsari, H. (2023). *BOOK-Digitalisasi Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi-Selatan (dalam pengajuan ISBN)*.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1-22.
- Latupapua, C. V., Hiariy, H., Atamimi, R., Latuihamallo, J., & Latuconsina, Z. (2022). Edukasi Masyarakat Negeri Sawai; Optimalisasi Potensi Usaha di Desa Wisata Berbasis Ekonomi Biru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13-19.
- Leksono, T. D., & Wiadnya, D. G. R. (2022). *Manajemen perikanan tangkap berbasis ekosistem dan analisis risiko*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Lestariningsih, S. P., Widiyastuti, T., & Dewantara, J. A. (2021). Tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 10(1), 1-12.
- Mardikanto, T. (1994). *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press.
- Muh D. B. B. (2008). *Konsep penyadaran Paulo Freire dan kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., ... & Martono, S. M. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Widina.
- Naibaho, A. A., Harefa, M. S., Nainggolan, R. S., & Alfiaturahmah, V. L. (2023). Investigasi pemanfaatan hutan mangrove dan dampaknya terhadap daerah pesisir di Pantai Mangrove Paluh Getah, Tanjung Rejo. *J-CoSE: Journal of Community Service & Empowerment*, 1(1), 22-33.
- Nurilmi, N. (2022). Ritual Akkattere Sebagai Kepercayaan Masyarakat Di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Peraturan JDIH KKP. <https://jdih.kkp.go.id/>
- Peta Kabupaten Bulukumba. <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=5>
- Prayuda, R. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46-64.
- Rahmawati, R., Afriandi, F., & Lisdayanti, E. (2024). Edukasi mangrove: Upaya peningkatan literasi bagi kelompok perempuan kawasan konservasi mangrove Aceh Jaya. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2424-2434.
- Rani, F., & Cahyasari, W. (2015). Motivasi Indonesia dalam menerapkan model kebijakan Blue Economy masa pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914-1928.
- Rijal, S. (2023). *BUKU-Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Blue Economy di Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Setyawati, Lutvia Resta, et al. (2021). Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di kota Sabang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 178-185.
- Suni, M. (2019). *BUKU-Wisata Bahari Ragam Budaya dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Soesanto, E., Wahyuningrum, C., & Handayani, A. (2024). Ketergantungan Ekonomi Pada Sektor Migas: Diversifikasi Sebagai Upaya Mengurangi Risiko Ekonomi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 3(1), 10-21.
- Upa, K. A., & Tidore, M. D. (2024). Upaya menjaga Labuan Bajo sebagai sustainable tourism melalui prinsip sustainability dan Blue Economy. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(8), 21-30.